

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pembentukan Karakter Bangsa melalui Pendidikan

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang penduduknya terdiri dari berbagai macam etnik, budaya, dan agama. Keberagaman ini di satu pihak merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang berharga dan di pihak lain dapat menjadi sumber konflik. Van Den Bergh 1965 (dalam Nasikun 1993 : 62-65) mengatakan bahwa tidak mudah untuk menumbuhkan suatu integritas nasional dalam masyarakat yang majemuk. Pada Forum Seskoad (2000 : 37) disebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk yang mudah menimbulkan kerawanan yaitu :

- a) Segmentasi ke dalam kelompok yang memiliki kebudayaan.
- b) Struktur sosial yang terbagi-bagi.
- c) Kurang mengembangkan konsensus.
- d) Sering terjadi konflik antar kelompok.
- e) Integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan.
- f) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok pada kelompok lain.

Dalam rentang sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak mengalami ancaman disintegrasi seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Aceh dan di Irian Jaya serta Maluku.

Peristiwa lain yang masih meninggalkan persoalan di antaranya bentrokan antar-etnik yang berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) di Ambon, konflik etnik di Kalimantan, antara etnik Madura dengan Dayak. Bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki satu kesatuan visi dalam berbangsa dan bernegara serta bentuk karakter bangsa sesuai dengan kemajemukannya (Tomagola, 2000 : 29).

Usaha pembentukan karakter bangsa dalam penyelenggaraannya harus selaras dengan nuansa potensi masyarakat yang majemuk, sehingga akan muncul bentuk jati diri bangsa Indonesia dalam wahana keberagaman yang dapat meminimalkan timbulnya kecemburuan antar etnis, budaya dan agama serta menghindarkan timbulnya disintegrasi bangsa (Adimihardja, 1999 : 12). Para pendiri negara (*founding father*) yang telah memproklamirkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dengan tulus mengakui bahwa kemerdekaan bangsa ini karunia Allah swt. Serta mereka juga menetapkan cita-cita nasional yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 dan ke-4 yang berbunyi : "*...atas berkat rahmat Allah SWT dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia...*" hal tersebut menuntut kesadaran pentingnya toleransi terhadap keberagaman serta ketidakberpihakan negara terhadap etnis, budaya atau agama tertentu, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang bersemboyan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan). Pancasila

dijadikan sebagai dasar negara, sekaligus merupakan wadah yang dapat menampung keberagaman nilai yang berasal dari agama, etnis, dan budaya di Indonesia.

Selain pentingnya persatuan dan kesatuan, usaha pembentukan karakter bangsa menuntut kesiapan masyarakat untuk dapat hidup dengan harmonis dalam kondisi yang majemuk. Hal ini menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat penting. Kesiapan anggota masyarakat untuk dapat berperan dengan baik di masa yang akan datang hanya dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Negara telah mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Tujuan dan fungsi utama dari Pendidikan Nasional seperti disebutkan pada UU No.2 tahun 1989 pasal 4 bahwa :

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sedangkan pada Undang-undang Sisdiknas terbaru No.20 tahun 2003 bab II pasal

3 di sebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yung Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan karakter dan watak bangsa melalui pendidikan ditekankan pada penghayatan dan pengamalan terhadap nilai moral, pengembangan kemampuan dan kecakapan, serta penanaman kedisiplinan dan pembiasaan sikap yang terpuji (*akhlakul karimah*). Penekanan pada ketiga aspek tersebut merupakan bentuk pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik secara proporsional dan seimbang. Sebagai perbandingan, Spears (dalam Huitt 1998 : 12) menyebutkan bahwa secara umum tujuan pendidikan di Amerika dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu :

- a) *Develop skills in reading, writing, speaking, and listening*
- b) *Develop pride in work and feeling of self-worth*
- c) *Develop good character and self-respect*

Memperbandingkan tujuan pendidikan di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki peradaban dan sejarah yang panjang (sejak 1775) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1945) merupakan hal yang tidak seimbang. Sebelum merdeka, Indonesia dalam sejarah budayanya telah melalui masa-masa kerajaan besar dan masa-masa penjajahan yang membentang dalam hitungan abad, hal ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan, terutama

pendidikan karakter. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat pribumi atau dikenal dengan istilah *boemi poetra* diberikan kesempatan yang terbatas dalam mengenyam pendidikan. Melalui politik etis, Belanda hanya membolcikan pribumi tertentu yang dapat memperoleh pendidikan formal.

Penanaman karakter bangsa, terutama di daerah Sunda, pada saat itu lebih banyak dilakukan secara informal, hal ini seperti tampak pada tujuan penanaman nilai-nilai yang harus diajarkan orang tua pada anaknya agar *ngomean adat bawa ti koedrat soepaya toeloey-toeloey tepi ka kolot salamet, kadeuleu koe sanak baraya, ari geus kolot eta boedak tangtoe di regepkeun papatahna, di toeroetan kalakoeanana* (Hasan Mustafa, 1913 : 9) artinya “ Pendidikan karakter untuk memperbaiki sikap bawaan yang kurang baik agar menjadi baik sehingga hidupnya selamat sampai hari tua serta pengalaman dan nasihatnya di jadikan teladan oleh keluarganya”

Sedangkan dalam bidang pendidikan formal salah satu bentuk perjuangan masyarakat Sunda adalah melalui Paguyuban Pasundan (1913) yang memiliki tujuan pendidikan Pasundan yaitu : *anoe djadi poko loeloegoe djudul atikan njaeta ngawangun pamake baroedak soepaja djadi djelema sampoerna, maksoedna awewe lalaki waspada, matang pamilih, pangadjen, koekoeh enggoning njeun poatoesan, temen wekel di pake ageman, kalajan satia kana poatoesan pribadi dina enggoning roemingkang saliring doemadi* (Djajadiningrat, 1939 : 70). Yang artinya “ Tujuan pendidikan adalah membangun karakter anak supaya menjadi manusia sempurna baik lelaki maupun perempuan dengan memiliki sikap waspada kepribadian yang mantap, harga diri, teguh pendirian

serta setia kepada utusan pribadi di dalam menghadapi kehidupan". Karena itu, maka Paguyuban Pasundan tahun 1922 mendirikan HIS (*Holland Irlanders School*) di Tasikmalaya (bersubsidi) dan pada tahun 1928 di dirikan pula sekolah MULO (bersubsidi) setingkat SLTP pada masa sekarang ini.

Penekanan tujuan pendidikan secara formal maupun informal adalah pada pembentukkan karakter melalui keteladanan dalam konteks pribadi serta dalam kehidupan di masyarakat, selamat dalam hubungan secara horisontal dan vertikal.

INS Kayu Tanam (1926) di daerah Sumatera Barat juga telah menekankan pada pendidikan watak budaya suatu bangsa, termasuk alam fikiran, perilaku yang di bentuk oleh kondisi alam tempat hidupnya untuk meraih dua surga di dunia dan di akherat (Navis, 1996 : 77). Sedangkan di Jawa Tengah Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa (1922), memiliki asas nonkooperatif dengan penjajah menerapkan pendidikan karakter yang lebih ditekankan pada pendidikan adab sebagai dasar untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, serta bagaimana bertindak sesuai dengan adab. Pendidikan adab sebagai pokoknya, sedangkan pengetahuan baru berikutnya. Walaupun begitu, ranah kognitif merupakan penunjang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga membentuk suatu perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa jiwa dan raga tidak terpisahkan, karenanya mendidik raga itu juga harus sambil mendidik jiwanya. Pendidikan harus mampu membentuk karakter manusia yang utuh, sehingga pada akhirnya setiap individu selain harus tahu, juga harus mau, dan mampu melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai bentuk peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada Masa Orde Baru (1965-1998) usaha mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya serta persiapan-persiapannya untuk menghadapi masa depan lebih ditekankan pada penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kemampuan penalaran dan sikap-tindak yang logis-ekonomis. Pengembangan budi pekerti dan penanaman nilai moral menjadi terabaikan, bahkan pendidikan moral Pancasila yang pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah perpecahan bangsa telah berkembang menjadi instrumen rezim (Djahiri-Ciced, Pikiran Rakyat tanggal 24 Maret 2000 : 8). Hal ini diperparah dengan upaya UU No.5/1974 untuk "menyeragamkan" adat di seluruh Indonesia yang dianggap sebagai sumber konflik di tanah air. Pendidikan telah mengalami pendangkalan nilai dalam bidang ilmu pada tataran simbolik dan sinoptik (Muchtar Buhori, Kompas 28 Mei 1996 : 10). Bappenas dalam Strategi Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya menyebutkan bahwa di bidang kebudayaan telah terjadi pendangkalan nilai moral, jati diri, dan kepribadian bangsa yang diakibatkan oleh pergeseran nilai budaya bangsa dan masuknya budaya asing serta munculnya kebutuhan hidup global (Team Bappenas, 20 Juli 2001, 21 : 22).

Pentingnya keseimbangan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus betul-betul disadari sebagai syarat untuk membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Huit (1999 : 24) mengatakan bahwa *character development must be seen as an organic process in the development of the physical, psychological, and spiritual aspects of human being*. Secara lebih lugas Lickona (1993 : 28) menyebutkan bahwa *education had two great goals : to help*



people become smart and to help them become good, sehingga karakter akan mencakup kemampuan mengetahui hal-hal yang baik, menginginkannya, melakukan kebaikan untuk sesama, dan melakukan kebaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. (dalam Djahiri 2002 : 78)

Dunia pendidikan harus membantu anak untuk mengerti nilai dasar (*core value*), menganut dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka, karena pada akhirnya karakter individu akan membentuk karakter masyarakat yang seterusnya akan mewarnai bentuk karakter suatu bangsa.

2. Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Lickona (1993 : 33) mengatakan bahwa *if school wish to makes a lasting difference in students' character and develop all three part of character (knowing, feeling, and behavior), they need a comprehensive concept of character and a comprehensive approach to developing it*. Perguruan Tinggi sebagai suatu lembaga yang memiliki kebebasan akademis melalui pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat membuat konsep pendekatan pengajaran dalam membentuk karakter serta membuat kriteria-kriteria karakter yang baik. Pada Perguruan Tinggi yang bersifat khas baik negeri maupun swasta dimungkinkan adanya mata kuliah yang bersifat ciri khas sebagai bentuk pendidikan karakter (kepribadian). Di Universitas Pasundan, yang merupakan tempat dilakukannya penelitian ini, dikenal adanya Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebagai identitas yaitu Mata Kuliah Islam Disiplin Ilmu (IDI) dan Mata Kuliah Budaya Sunda (BS).

Perbaikan usaha pendidikan karakter terutama di perguruan tinggi diperlihatkan melalui upaya pemerintah Republik Indonesia dengan melaksanakan penataan kurikulum perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam keputusan Mendiknas RI No.232/U/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa yang di dalamnya memuat kelompok mata kuliah :

- a) MPK (Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian)
- b) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian)
- c) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)
- d) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya)
- e) MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)

Selanjutnya untuk Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian diterbitkan beberapa surat keputusan yang mengaturnya seperti :

- 1) SK Dirjen Dikti No.263/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti MPK Mata Kuliah Agama.
- 2) SK Dirjen Dikti No.265/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti MPK Mata Kuliah Pancasila.
- 3) SK Dirjen Dikti No.267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti MPK Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengganti Mata Kuliah Kewiraan Nasional.

Universitas Pasundan dalam mengembangkan kurikulumnya mengacu kepada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



telah memasukkan MKWU (Mata Kuliah Wajib Universitas) berupa Mata Kuliah Budaya Sunda dan Islam Disiplin Ilmu sebagai kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) yang mengakar kepada budaya Sunda dan implementasi Agama Islam sesuai dengan visi dan misi Universitas Pasundan yang tertuang pada Statuta Tahun 2000 Bab II Pasal 4 dan 5.

Di setiap perguruan tinggi juga terdapat Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki kehidupan di masyarakat, sehingga dia mampu mengembangkan kehidupan yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang bahagia, menjadi warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila (Kurikulum Inti MKDU, 1983). Sarjana yang ingin di hasilkan adalah sarjana yang memenuhi kriteria- kriteria seperti :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tampak dalam sikap dan tindakannya sesuai dengan ajaran agama yang di anutnya serta tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
- 2) Berjiwa Pancasila yang tampak dalam perilaku dan segala keputusannya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- 3) Memiliki wawasan komprehensif dan integral yang tampak dalam perilaku ketika menghadapi permasalahan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Sedangkan pada perguruan tinggi yang bersifat kependidikan seperti di Universitas Pendidikan Indonesia terdapat Program Studi Pendidikan Umum. Menurut PH. Phenix (1964 : 270) *General Education is the process of engineering*

essential meaning : symbolics, empirics, esthetics, synoetics, ethics and synopthics. Pendidikan Umum sebagai *general education* menitikberatkan pada pengembangan keutuhan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga Pendidikan Umum akan berorientasi ganda yaitu sebagai *non functional knowledge* yang berisi teori akademik dan *functional knowledge* guna memenuhi tuntutan manusia abad 21. PPS UPI memiliki visi untuk Pendidikan Umum (2003): *Humanizing* secara utuh/kaffah, *Civilizing*, *Empowering* yang diterapkan dalam kehidupan manusia (*human life*) (Djahiri, 2003).

Melalui Pendidikan Umum, manusia Indonesia modern tidak akan kehilangan keutuhan jati diri sebagai insan yang kodrati-Ilahiyahnya maupun sebagai insan ipoleksosbudag yang berkepribadian Indonesia (Sobana, Lemhanas RI, 4 Oktober 2001). Hal ini sesuai dengan visi Pendidikan Umum di PPS UPI (2003) yaitu : Memanusiakan manusia (*humanizing*) secara utuh / kaffah, membentuk warga negara yang baik (*civilizing*), dan meningkatkan sumber daya manusia (*empowering*) (Djahiri, 2003). Pendidikan Umum memungkinkan karakter dan potensi manusia dapat utuh berkembang, dan mengangkat derajat manusia menjadi warga negara yang baik yang mampu hidup dan menghidupi dunia yang di huninya (Portofolio Program Pendidikan Umum, 2001 : 11).

3. Keberadaan Nilai Moral Budaya Sunda (NMBS) pada Pendidikan

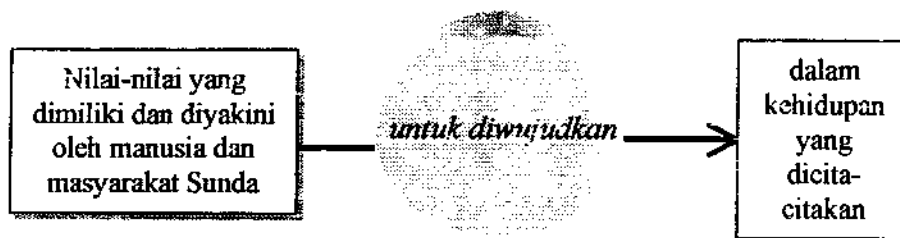
Keberadaan NMBS pada pendidikan diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab XV Pasal 54 di sebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sri Sultan Hamengkubuwono (2000 : 56) menyebutkan pentingnya kesadaran terhadap keberadaan nilai moral yang bersumber dari budaya lokal sebagai modal utama untuk membangun kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Budaya lokal memiliki *core value* yang diyakini kebenarannya karena telah teruji dalam rentang ruang dan waktu masyarakat tersebut.

Melalui UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan seluruh potensi daerahnya untuk terbentuknya karakter bangsa yang diwarnai oleh nilai-nilai kedaerahan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Perda No.5, No.6, dan No.7 Tahun 2003 sebagai pengganti Perda tahun 1996 berupaya untuk memelihara bahasa, sastra, aksara, dan kesenian daerah serta pengelolaan keurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Melalui pemberdayaan Perda ini diharapkan bahwa kebudayaan Sunda dapat lebih direaktualisasi dan direvitalisasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Ekadjati (1995) mengatakan bahwa Nilai Moral Budaya Sunda (NMBS) merupakan jati diri etnik Sunda yang bersumber pada nilai, kepercayaan dan peninggalan kebudayaan Sunda dan dijadikan acuan dalam bertingkah laku. Bagi masyarakat Sunda nilai-nilai moral budaya Sunda merupakan benteng kokoh untuk menghadapi era globalisasi. Menurut Rusyana (2001) NMBS ialah nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Sunda yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad masyarakat Sunda untuk mewujudkannya. Di dalamnya terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dibentuk oleh manusia dan masyarakat Sunda. Secara sistematis digambarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1 Sistematis Perwujudan Nilai pada Masyarakat Sunda



(Yus Rusyana, 2001 : 16)

Proses ini akan berlangsung seumur hidup melalui pendidikan, baik pendidikan formal oleh sekolah maupun informal oleh keluarga dan masyarakat.

4. Visi dan Misi dalam Usaha Pembentukan Karakter Individu

Diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, telah mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan visi dan misinya di tahun 2010 yang perumusannya telah dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2000 di Putri Gunung Cottage Lembang. Pada rumusan visi ini dikatakan bahwa potensi etnik Sunda dalam pembangunan harus di hargai, jati diri *Ki Sunda* harus di tampilkan.

Visi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu : “ Dengan iman dan taqwa, Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010.” Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.
- b. Mendorong berkembangnya *civil society* (masyarakat yang *silih asah, silih asih, silih asuh* serta *cageur, bageur, bener, pinter jeung singer*).
- c. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka (*clean and transparency goverment*).

- d. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Menjadikan kawasan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
- f. Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
- g. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa visi Pendidikan Nasional yaitu :

“Terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu aktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.”

Untuk mencapai visi tersebut di atas yang sejalan dengan misi pendidikan nasional sebagai berikut :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat untuk mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi Pendidikan Nasional tersebut, berusaha mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab melalui pendidikan.

Istilah visi dan misi juga telah dikenal oleh lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi yang membuat Pedoman Pengelolaan Mutu Terpadu (PPMT) seperti di kembangkan oleh Universitas Gajah Mada pada tahun 1994. Pada umumnya sejak itu semua perguruan tinggi mencantumkan visi dan misi perguruan tingginya. Secara definitif, visi merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk tujuan masa depan. Visi ini dapat digeserkan bila terdapat informasi yang lebih akurat. Visi dan misi dapat membantu mengarahkan pencapaian tujuan dan menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan ketentuan yang telah disepakati (Sanusi, 1998 : 20).

Universitas Pasundan (Unpas) sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di Jawa Barat memiliki visi yang khas seperti termaktub dalam Bab II Pasal 4, Statuta Unpas 2000 yaitu : “Universitas yang berkualitas nasional yang mampu memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan agama Islam yang selaras, serasi, dan seimbang serta menjadi pusat pengembangan kebudayaan Sunda di Indonesia.”

Selanjutnya visi Unpas tersebut dirumuskan ke dalam misi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, serta memiliki misi khusus yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya Sunda serta mengagungkan agama Islam sebagai pencerminan identitas. (Statuta Universitas Pasundan Bab II Pasal 5/2000).

Pencapaian visi melalui pelaksanaan misi di Unpas ditujukan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki kualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berbudi pekerti luhur.
- b. menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

- d. mengagungkan agama Islam, melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda untuk mewujudkan lulusan yang *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana*.

5. Permasalahan Teoretis

Sistem nilai secara biologis adalah benar, keadaan tanpa nilai adalah psikopatogenik, dan pada abad ini tidak adanya nilai-nilai menjadikan keadaan itu jauh lebih gawat dari keadaan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia menurut Abraham Maslow pada Religion (dalam Frank Gobie, 1994 : 181). Di negara maju seperti Amerika Serikat, tujuan pendidikan nilai adalah untuk membentuk karakter yang baik, dewasa secara moral, kejujuran, dan integritas dilandasi oleh pengetahuan, kemampuan belajar siswa, sikap, dan perilaku (Cambel and Bond, 1982 dalam Djahiri 2002a : 19). Sejak awal, pendidikan moral di Amerika Serikat, seperti di Inggris, di dasarkan pada nilai-nilai dan norma moral yang baku dan berasal dari Bible. Pada perkembangan selanjutnya kondisi ini mengalami goncangan dengan berkembangnya faham-faham seperti :

- a. *Darwinisme* yang mengakibatkan pemahaman bahwa nilai moral juga dapat berevolusi.
- b. *Positivisme* yang menganggap nilai moral bersifat subjektif dan relatif sehingga tidak ada nilai yang dapat dikatakan nilai yang paling benar.
- c. *Personalisme* yang menganggap nilai moral memiliki sifat personal sehingga penalaran nilai menjadi bersifat pribadi.

- d. *Pluralisme* dan sekularisme yang menghormati kebebasan dan keberagaman telah menganggap nilai moral sebagai sesuatu yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain.
- e. *Individualisme* yang sangat menghormati keberadaan manusia sebagai individu yang mandiri sehingga menganggap nilai moral yang dianut seseorang lebih merupakan ekspresi dirinya sendiri dalam kehidupan.

Jika di lihat dari sudut ketuhanan, McLean (1994 dalam bukunya *The Spiritual a Human Being*) yang maksudnya menyatakan bahwa empat dari sepuluh ahli pendidikan di Amerika Serikat percaya adanya Tuhan dan nilai-nilai yang dikembangkan manusia harus berasal dari Tuhan, sedangkan enam orang tidak percaya bahwa Tuhan ikut serta dalam mengatur nilai-nilai dalam kehidupan manusia, nilai-nilai menurut mereka di kembangkan oleh dan untuk kepentingan manusia (*humanisme*). Hal ini telah memberikan banyak kontribusi serta masalah. (dalam Djahiri 2002a : 69).

Di dalam Pendidikan Nilai seringkali dijumpai berbagai istilah yang serupa dalam arti tetapi tidak sama secara etimologis, seperti norma dan etika. Norma memiliki kekuatan motif yang berdimensi kognitif, motif moral dihayati oleh diri sendiri (Hoffman, 1975 dalam Djahiri 2002a : 100). Etika adalah bagian dari filsafat tentang baik dan hidup yang baik. Etika bukan hanya kumpulan harus dan jangan, tetapi pilihan diri dan tanggung jawab diri (Paul Satre 1984, dalam Solomon 1984 : 28). Etika berkaitan erat dengan etos (cita-cita masyarakat) dipersamakan dengan filsafat moral yang berintikan pada hukum moral, hukum universal, rasional, objektif yang menyangkut orang lain, moralitas ini terdiri dari

hukum yang pasti sebagai cara yang kuat untuk mengupayakan kebenaran mutlak (Khan, Solomon, 1984 : 10 dalam Djahiri 2002a : 75).

Fakta bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam norma, etika, dan moral adalah baik dan harus, hal itu tampak pada perjanjian lama yang menyebutkan harus taat pada hukum Tuhan dan pada perjanjian baru harus saling mencintai, premis dan fakta sering bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, hal ini disebut *emotifisme* (David Humme, 1984). Pada perkembangannya terjadi perbedaan pandangan mengenai nilai antara *Behavioristik* (Maslow) Versus *Relativisme* (Darwin). Relativisme memandang nilai tidak memiliki dasar ilmiah, sedangkan Behavioristik menyatakan bahwa nilai utama manusia adalah nilai luhur yang di dambakan orang yang mengaktualisasi diri dari orang lain sebagai perjalanan puncak mereka (Maslow, dalam Goble, 1994 : 149).

Pendidikan moral dapat diajarkan secara integral sepanjang hayat, menurut Piaget, Kohlberg, Huitt, Dewey, Wineccof, dan Djahiri. Sedangkan Huchin berpendapat bahwa pendidikan moral lebih bijak jika kita biarkan pengalaman diajarkan oleh hidupnya sendiri (Huchin 1988 : 135 dalam Djahiri 2002a : 103). Faham tersebut di atas telah mempengaruhi bentuk model pengajaran nilai yang secara umum di kelompokkan menjadi tiga, yaitu model yang berdasarkan pada :

- a. *Value clarification technique* (VCT) yang menekankan bahwa jangan memaksakan nilai, bantu siswa untuk memilih nilai mereka dengan bebas.
- b. Hasil diskusi terhadap teori tahapan perkembangan dari Kohlberg yang menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran moral siswa sehingga mereka dapat menentukan nilai mana yang paling baik.

- c. Model yang dikembangkan oleh Emile Durkheim yang menyebutkan bahwa penanaman nilai harus dilakukan dengan cara indoktrinasi dalam kelompok, sehingga timbul ketaatan.

Di Indonesia pendidikan nilai dan moral identik dengan *pendidikan budi pekerti* yang mengharuskan manusia untuk cerdas dan berbudi, dapat memerintah diri sendiri, otonom menekan hawa nafsu dan menetapkan tata tertib untuk dirinya sendiri dengan penekanan pada disiplin (Ki Hajar Dewantara, 1962 : 454). Budi pekerti ini sering diartikan sebagai moralitas yang mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, dan perilaku yang berkaitan dengan Tuhannya, diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat dan bangsa, serta hubungan dengan alam sekitarnya (Sedyawati 1999: 5).

Walaupun demikian, ketidaksepahaman para ahli pendidikan tidak menimbulkan pertentangan siapa subjek pendidikan, ia akan tetap manusia. Adapun nilai yang akan dicapai pada dasarnya tetap nilai yang baik walaupun dalam keyakinan terhadap Tuhan ada yang berlandaskan agama, spiritual, dan ada juga yang berlandaskan rasio saja.

Namun bagi Indonesia yang multi etnik, budaya dan agama dimana setiap etnik telah memiliki keyakinan serta telah memahami nilai-nilai yang dimiliki sepanjang sejarah budayanya untuk mengokohkan jati diri, serta meningkatkan budi pekerti dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tangguh dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang muncul dari skenario globalisasi (Fakri Gaffar, Pikiran Rakyat 11-11-1996).



6. Tantangan etnik Sunda di Jawa Barat

Sejak dulu etnik Sunda telah memiliki jati diri yang khas yaitu memiliki bahasa, sastra, adat istiadat, etika dan tata busana sendiri. (menurut Salmoen orang Sunda memiliki sifat *berag, goembira, akoean, resep toetoeloeng, tiasa koemawoe!a, babari sadrah, sareng apik, hunjakalna sok radjeun koemoereb toer kamba* 1939 : 128). Yang artinya orang Sunda memiliki sikap periang, gembira, ramah, suka membantu, dapat mengabdikan, mudah menerima takdir, apik tetapi sayangnya mudah tersinggung dan cepat merasa puas.

Kebanyakan etnik Sunda taat dan hormat kepada orang tua, guru serta pemimpin masyarakat seperti disebutkan Puradiredja (1939 : 83) *suhud ka indung bapa, tuhu ka guru, gumusti ka ratu, kituna teh adat ngajadi kana ciri wanci kasundaan di golongan jalma pantes sareng menak*. Nilai seperti ini merupakan padanan dari nilai *guru ratu wong atua karo* pada tradisi Jawa. Dari pernyataan di atas ada perbedaan pokok antara tradisi Jawa dan Sunda yaitu Jawa mendahulukan guru, ratu, baru orang tua. Sedangkan di Sunda mendahulukan orang tua, guru, baru kepada ratu.

Kehidupan keluarga dan masyarakat Sunda terutama yang tinggal di perkotaan, mengalami perubahan karena banyaknya informasi. Berkaitan dengan wujud kebudayaan sebagai kompleks ide dan gagasan, kompleks aktivitas berpola dan sistem sosial dan karya manusia yang harus dijaga dan dilestarikan maka pergeseran nilai budaya dapat dikategorikan sebagai gejala yang sangat mengkhawatirkan. Etnik Sunda adalah penduduk asli tatar Pasundan yang memiliki karakteristik budaya, bahasa, agama, tradisi, mata pencaharian, serta

berbagai peninggalan budaya leluhur yang khas. Bagi masyarakat Sunda nilai-nilai moral budaya Sunda merupakan benteng kokoh untuk menghadapi era globalisasi.

Digelarnya Seminar Sunda dan Jawa Barat 2010 di Hotel Putri Gunung (2000) serta Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat 2000 menunjukkan keperdulian pemerintah Provinsi Jawa Barat akan kondisi serta perkembangan masyarakat Sunda dan tanggap atas terbitnya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah yang berlaku efektif tanggal 1 Februari 2001. Untuk itu di rencanakan akan di bangun kawasan budaya Lembur Sunda di Dago Pakar melalui SK. Gubernur Kepala Daerah TK. I Jabar No.430.05/SK.606-BINSOS/1999. Dan pada tahun 2003 di terbitkan Perda No.5, 6 dan 7 tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan bahasa daerah, pelestarian kesenian, kebudayaan daerah, pemeliharaan nilai-nilai tradisional, serta sejarah dan museum daerah Jawa Barat.

Selanjutnya pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus 2001 di gedung Konfrensi Asia Afrika telah diselenggarakan Konfrensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) pertama yang melibatkan banyak pakar budaya termasuk dari luar negeri atas sponsor Toyota Foundation dan Pemda Provinsi Jawa Barat. Etsuko Kawasaki sebagai *Assistant Program Officer* mengatakan bahwa KIBS ini merupakan bentuk usaha penyelamatan budaya Sunda dari kepunahan (Kalawarta KIBS No.3 Juni 2001).

Pada tanggal 16 April 2001 telah diselenggarakan semiloka untuk mengkaji Perda No.5,6 dan 7 /1996 tentang memajukan budaya, bahasa, dan aksara Sunda.

Semiloka pemberdayaan Perda ini diselenggarakan oleh LBSS dan Universitas Padjadjaran yang mengungkapkan hal sebagai berikut :

- a. Sunda *kiwari* (sekarang) adalah suku bangsa no.2 terbesar di Indonesia.
- b. Sunda *pituin* (asli) berjumlah 70% dan Sunda *mukimin* (Pendatang) 30%.
- c. Anggota DPRD TK I Jawa Barat 49% etnik Sunda dan 51% non Sunda.
- d. Dibidang politik etnik Sunda tertinggal dibandingkan etnik dari Sumatra, hal-hal yang kontradiktif timbul dari keterbukan Jawa Barat yang menarik bagi para pendatang baru disisi lain kurang menguntungkan bagi penduduk asli.

Sehingga menurut Ganjar Kurnia, (2001) perlu strategi kebudayaan berupa :

- 1) Meningkatkan kesadaran elit Sunda
- 2) Meningkatkan daya saing di bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) Revitalisasi budaya yang baik termasuk bahasa Sunda sebagai bahasa pergaulan untuk keunggulan kompetitif.
- 4) Menjadikan Kabupaten dan Universitas sebagai pusat budaya

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Lubis (2001 : 67) menekankan bahwa sikap moral elit Sunda harus mengembangkan sikap *teuneung ludeung* (berani memikul resiko) agar tidak kalah bersaing dengan etnik lain. Dalam usaha memajukan kebudayaan Sunda, perlu memanfaatkan Undang-Undang No.22/1999 tentang otonomi daerah agar budaya Sunda menjadi pribumi di *sarakannya* sendiri.

Ayat-ayat kebudayaan perlu dikaji ulang dan di beri tafsiran baru (Wasilah, *Revitalisasi Jati Diri, Pikiran Rakyat*, 19 Juli 2001 : 8)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tadi maka masalah di rumuskan sebagai berikut :

“ Apakah penggalian, reaktualisasi, revitalisasi, dan implementasi Nilai Moral Budaya Sunda sebagai jati diri melalui Tri Darma Perguruan Tinggi dalam merealisasikan visi dan misi Universitas Pasundan untuk menghadapi era globalisasi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang penting ?”

C. Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka fokus penelitian di pusatkan pada : “Kontribusi kelembagaan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan Nilai Moral Budaya Sunda (NMBS) pada visi dan misi Universitas Pasundan untuk mempersiapkan mahasiswanya sebagai sumber daya manusia yang memiliki nilai *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana* (tinggi ilmunya, teguh agamanya, luas budayanya)”.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian tadi maka lahirilah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan apakah yang diterapkan di dalam menetapkan visi dan misi serta pelaksanaan berikut pemantauan pencapaiannya di Unpas ?
2. NMBS apakah yang hendak di implementasikan dalam visi dan misi Unpas berikut dalam MKWU sebagai pendidikan umum?
3. Bagaimana pemahaman pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa Unpas terhadap visi dan misi Unpas, NMBS serta MKWU sebagai pendidikan nilai ?

4. Apakah Unpas sudah memiliki dan melaksanakan model implementasi NMBS untuk mencapai nilai *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menemukan NMBS yang bersifat khas untuk di terapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Sunda sebagai jati diri bangsa dalam menghadapi skenario globalisasi.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mendeskripsikan dan menganalisis serta menemukan NMBS yang diimplementasikan ke dalam visi dan misi Universitas Pasundan yang di realisasikan melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta menciptakan model yang berkaitan dengan itu agar tercapai nilai *luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang besar baik dari sisi teoretis, praktis, dan kelembagaan.

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah hasanah keilmuan yang menyangkut NMBS dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengembangkan makna pendidikan nilai sebagai pendidikan karakter agar peserta didik memiliki akar kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tidak tercabut dari akar budayanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan implementasi NMBS dalam visi dan misi lembaga, pendidikan, dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat
- b. Melestarikan NMBS yang universal sebagai bahan pendidikan nilai (karakter) dalam membina kepribadian bangsa.

3. Manfaat Kelembagaan

- a. Mendukung pelaksanaan dan pemberdayaan Undang-Undang No.22 tahun 1999 di bidang pendidikan dan budaya.
- b. Menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memasyarakatkan Perda No.5 Tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, Perda No.6 Tahun 2003 tentang pemeliharaan kesenian, serta Perda No.7 Tahun 2003 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum.

G. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, sumber data primer mengenai nilai-nilai kesundaan dan pendidikan kesundaan di peroleh dari unsur pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa serta para ahli dari Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Paguyuban Pasundan, serta para ahli pada Konferensi Internasional Budaya Sunda di Bandung. Sedangkan yang menyangkut keetnikan dan Pendidikan Umum di peroleh dari para ahli dan widyaiswara pada saat pendidikan dosen kewarganegaraan angkatan ke-45 di Lemhanas RI Jakarta. Sedangkan data sekunder di peroleh dari berbagai pustaka



dan dokumen-dokumen yang masih berlaku baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari Unpas, YPTP dan PP termasuk foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan implementasi NMBS dalam visi dan misi Unpas.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitik, di tekankan pada proses serta bersifat induktif. Menurut Nasution (1988), Sujana, Ibrahim (1989), dan Al Wasilah (2002) penelitian yang demikian merupakan penelitian kualitatif.

Instumen penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Nasution (1988) dan Al Wasilah (2002) penelitian kualitatif sangat di utamakan data langsung dari tangan pertama, karena itu peneliti disyaratkan langsung ke lapangan dalam kegiatan observasi, wawancara dan partisipasi aktif sebagai instrumen penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Milles & Huberman (1992 : 28) bahwa dalam penelitian kualitatif pendekatan yang di lakukan harus bersifat *grounded* yang induktif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, partisipasi aktif, dan studi dokumenter.

- a. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dari pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pasundan (Unpas) yang berkaitan dengan implementasi Nilai Moral Budaya Sunda (NMBS) serta visi dan misi Unpas.
- b. Teknik wawancara dilakukan dalam suasana dialogis untuk memperoleh informasi verbal secara langsung dari narasumber mengenai latar belakang

sikap dan perilaku pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan di lingkungan Unpas berkaitan dengan implementasi NMBS serta visi dan misi Unpas.

- c. Partisipasi aktif dipergunakan untuk memperoleh data tentang kenyataan sikap dan perilaku pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan di lingkungan Unpas berkaitan dengan implementasi NMBS serta visi dan misi Unpas. (lihat foto-foto kegiatan).
- d. Melakukan analisis terhadap nilai moral dari berbagai kegiatan, perbuatan, perkataan, dan tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya hasil analisis di maknai dan di tafsirkan.

3. Studi Dokumentasi dan Pustaka

Studi dokumentasi dan pustaka baik yang bersifat teoretis maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi NMBS serta visi dan misi di pergunakan untuk menggali berbagai teori, konsep, dan pendapat para pakar yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi dokumentasi dan pustaka banyak di fokuskan pada peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh Unpas maupun Pemerintah RI.

4. Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif

Analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, observasi, wawancara, dan partisipasi aktif yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto. Data-data tersebut di baca, di pelajari, dan di telaah. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi yang berisi rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu di jaga agar tetap berada di

dalamnya. Langkah berikutnya menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian di kategorisasikan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keabsahan data untuk memunculkan penafsiran dan pemaknaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (1998) yang menganjurkan bahwa langkah dalam melakukan analisis data yakni melakukan reduksi data, display data, serta membuat kesimpulan dan verifikasi.

5. Situs Penelitian

Situs penelitian pada penulisan disertasi ini adalah di Unpas yang didirikan pada tanggal 14 November 1960 di Bandung, bernaung di bawah organisasi Paguyuban Pasundan yang didirikan pada tahun 1913 yang memiliki tujuan organisasi "*merangan kabodoan jeung ngaraharjakeun urang Sunda.*" Unpas bercita-cita mewujudkan masyarakat yang berbahagia serta di ridhoi oleh Allah SWT. Pada Statuta Bab II Pasal 4 Tahun 2000 secara tegas mencantumkan "memuliakan agama Islam dan mengembangkan Budaya Sunda serta menjadi pusat kebudayaan Sunda di Indonesia." Unpas memiliki tujuh fakultas yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Seni, serta Pasca Sarjana (S2). Jumlah mahasiswa pada tahun 2001/2002 mencapai 18.858 orang sekitar 70 % berasal dari suku Sunda, 13% berasal dari suku Jawa, 2% berasal dari suku Batak, 0,25% berasal dari Bali, 5,3% berasal dari Minang, 5,3% berasal dari Melayu dan 4,15% berasal dari suku lainnya di Indonesia. Sedangkan menurut agama yang dianutnya, sekitar 0,8% beragama Protestan, 0,2% beragama Hindu, 0,5% beragama Budia, 0,4% menganut agama

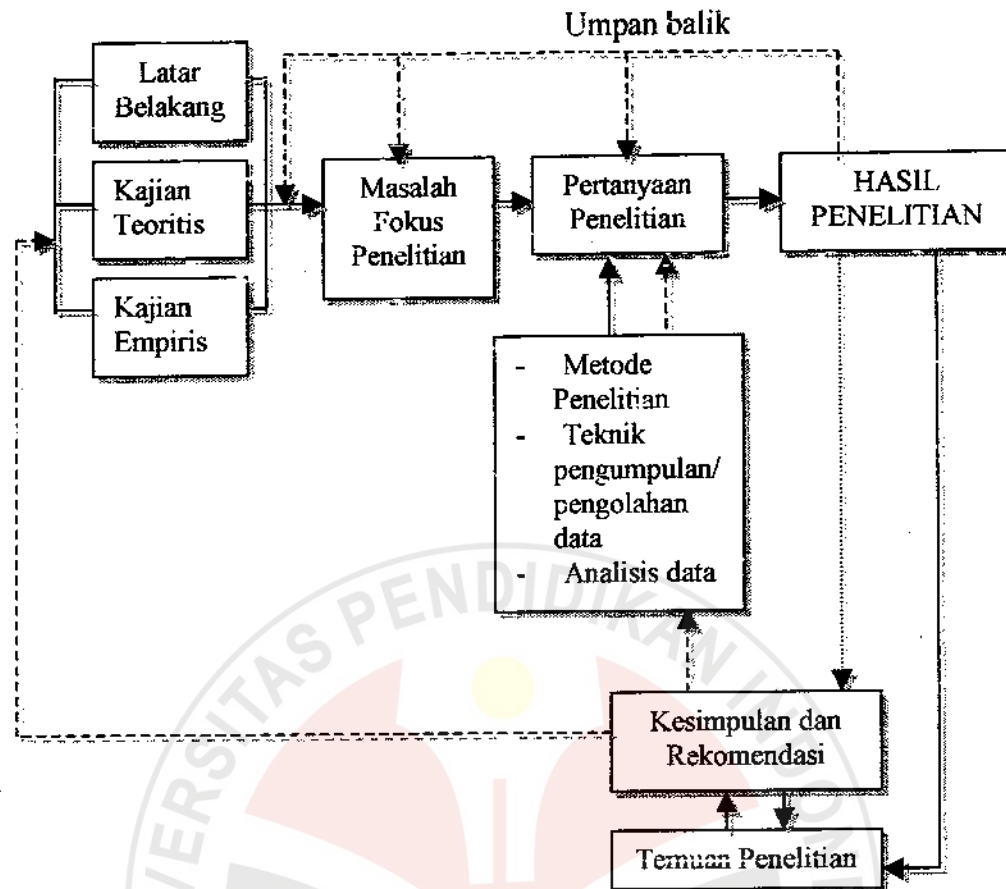
Katolik dan 0,5% menganut agama Kristen dan sebanyak 97,6% menganut agama Islam (Sumber : Biro Kemahasiswaan, 2002).

H. Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai contoh pernyataan yang terus menerus mendasari penelitian untuk beberapa lama sebelum penelitian terjawab. (*Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 5, 1992 : 2552). Menurut Lincoln and Guba (1985 : 24), paradigma adalah seperangkat sistem keyakinan atau aksioma tentang fenomena, interaksi antara peneliti dengan fenomena, kontekstual fenomena, interaksi antar fenomena, peran nilai dalam penelitian, serta implikasi metodologisnya dalam penelitian. Bogdan and Biklen (1982 : 32) menyatakan bahwa paradigma mengandung pengertian sebagai seperangkat aksioma yang di pegang bersama konsep atau proposisi. Paradigma akan mengarahkan cara berfikir dan cara melakukan penelitian.

Penelitian ini di lakukan berdasarkan paradigma naturalistik karena memiliki karakteristik yang fokus penelitiannya mengkaji permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan alamiah yaitu, implementasi NMBS dalam visi dan misi perguruan tinggi di Jawa Barat (studi kasus pada Universitas Pasundan). Paradigma penelitian tentang implementasi NMBS dalam visi dan misi Unpas di susun dalam gambar berikut :

Gambar 2 Paradigma Penelitian



Penelitian ini bersifat konstruksional-kontekstual serta multi dimensional sehingga kemampuan peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian dan mencermati hasil kerja peneliti akan sama pentingnya dengan mencermati konstruk partisipan. Oleh sebab itu, simpulan tertentu atas dasar kontek disertai dengan informasi *setting* alamiah sekaya mungkin akan lebih bermakna dari pada simpulan umum yang bebas kontek. Selanjutnya karena penelitian ini bersifat multi dimensional maka penjelasan dialektis yang melibatkan banyak aspek dan dimensi akan lebih bermakna sebab akibat. Hal ini di sebabkan karena unsur yang digali yaitu nilai-nilai moral budaya Sunda tidak lepas dari kehidupan dan

interaksi manusia Sunda baik dengan Tuhannya, pribadinya, lingkungan alamnya, masyarakatnya, maupun dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan lahir batinnya.

I. Definisi Operasional pada Judul

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk mengetahui makna dan maksud serta kaitannya dengan penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penerapan NMBS di dalam visi-misi Unpas melalui berbagai strategi dan oprasionalisasi pencapaian tujuan melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di tambah dengan pengembangan dan penerapan identitas untuk mencapai nilai *Luhung Elmuna, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana* sesuai statuta Unpas (gambar 3).

2. Visi dan Misi

Yang dimaksud dengan visi dan misi dalam judul disertasi ini adalah visi dan misi dari Universitas Pasundan yang tertera dalam statuta Unpas tahun 2000 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada bab III pasal 4 tentang visi dan misi Unpas yang berbunyi : “Visi, Universitas yang memiliki kualitas nasional yang mampu memadukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan Agama Islam yang selaras, serasi dan seimbang serta menjadi pusat pengembangan Budaya Sunda di Indonesia (Statuta 2000 : 4)

Sedangkan pada bab II pasal 5 dijelaskan tentang misi Unpas yang berbunyi :”Misi Unpas memiliki tridarma : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta melaksanakan misi khusus : menjaga, melestarikan dan

mengembangkan budaya Sunda serta mengagungkan agama Islam sebagai pencerminan identitas Unpas (statuta 2000 : 5).

Statuta Unpas ini disahkan melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan No. 105/YPTP/LX/2000.

3. Nilai Morai Budaya Sunda

Kosasih Djahiri (1996 : 22) mengatakan bahwa nilai moral adalah sesuatu yang berhubungan baik menurut standar logika, estetika, etika, agama, dan hukum serta jadi acuan dan sistem keyakinan diri maupun kebudayaan. Sedangkan yang di maksud dengan nilai moral budaya Sunda ialah nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia dan masyarakat Sunda yang di yakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada manusia dan masyarakat Sunda untuk mewujudkannya. Jadi nilai moral budaya Sunda dalam penelitian ini adalah seluruh kristalisasi nilai moral Sunda yang dijadikan acuan perilaku manusia Sunda.

4. Universitas Pasundan

Yang dimaksud Universitas Pasundan dalam penelitian ini adalah nama Perguruan Tinggi yang di jelaskan pada Bab II pasal 2, Statuta Unpas tahun 2000 Yang berbunyi :

- (1) Nama lembaga pendidikan tinggi adalah Universitas Pasundan di singkat Unpas.
- (2) Universitas di dirikan pada tanggal 14 November 1960 oleh Yayasan Universitas Pasundan, yang kini telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. (YPTP)
- (3) Universitas Pasundan berkedudukan di Bandung. (statuta 2000 : 3)



Unpas memiliki ciri khas yang menetap, yaitu kesundaan dan keislaman (Bab II pasal 4, butir II Statuta 1992 : 5). Hal ini mengacu kepada No.60/1999 tentang Perguruan Tinggi dan Kepmendiknas No.232/U/2000 Tentang Kurikulum Perguruan Tinggi yang menyangkut ciri khas, dulu disebut muatan lokal, bagi Unpas dilakukan melalui perkuliahan MKWU (Mata Kuliah Wajib Universitas) yang terdiri dari mata kuliah Budaya Sunda (BS) dan mata kuliah Islam Disiplin Ilmu (IDI). Adapun visi dan misi Unpas ini mengacu pada visi dan misi Paguyuban Pasundan Pasca Reformasi (lihat lampiran 8).

5. Beberapa Istilah dan Singkatan yang Dipergunakan dalam Penelitian Ini

- a. SD = Sekolah Dasar
- b. SLTP = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- c. SLTA = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- d. PPS UPI = Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- e. Pemda = Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- f. DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- g. Perda = Peraturan Daerah (yang disahkan oleh DPRD)
- h. YPDM = Yayasan Pendidikan Dasar dan menengah Pasundan
- i. YPTP = Yayasan pendidikan Tinggi Pasundan
- j. TPTP = Yayasan pendidikan Tinggi Pasundan
- k. Yakesra = Yayasan Kesejahteraan Pasundan
- l. PP = Paguyuban Pasundan
- m. Lemhannas = Lembaga Ketahanan Nasional
- n. Doswar = Dosen Kewarganegaraan
- o. KIBS = Konfrensi Internasional Budaya Sunda
- p. KSAD = Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdang gula (pupuh)
- q. MKDU = Mata Kuliah Dasar Umum
- r. MKU = Mata Kuliah Umum
- s. MKPK = Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian

- t. MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian
- u. MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya
- v. MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya
- w. MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
- x. MKWU = Mata Kuliah Wajib Universitas
- y. MKBS = Mata Kuliah Budaya Sunda
- z. MKIDI = Mata Kuliah Islam Disiplin Ilmu
- aa. Ospek = Orientasi Pengenalan Kampus
- bb. Mabim = Masa Bimbingan (bagi mahasiswa baru)
- cc. SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan
- dd. Dirjen Dikti = Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- ee. Mendiknas = Menteri Pendidikan Nasional
- ff. Sisdiknas = Sistem Pendidikan Nasional
- gg. IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- hh. NMBS = Nilai Moral Budaya Sunda
- ii. LBS = Lembaga Budaya Sunda
- jj. LPPSI = Lembaga Pengembangan Syi'ar Islam
- kk. PPMT = Pedoman Pengendalian Mutu Terpadu
- ll. RIP = Rencana Induk Pengembangan
- mm. Renstra = Rencana Induk Strategis
- nn. Renop = Rencana Operasional (Tahunan)
- oo. UUD = Undang-Undang Dasar
- pp. UU = Undang-undang
- qq. GBHN = Garis Besar Haluan Negara
- rr. FH = Fakultas Hukum
- ss. FISIP = Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- tt. FT = Fakultas Teknik
- uu. FE = Fakultas Ekonomi
- vv. FKIP = Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- ww. FSS = Fakultas Seni dan Sastra
- xx. BAAK = Biro Administrasi Akademik

yy. BAUM	= Biro Administrasi Umum
zz. Lisma	= Lingkung Seni Mahasiswa
aaa. DKM	= Dewan Keluarga Mesjid
bbb. IOM	= Ikatan Orang Tua Mahasiswa
ccc. BBKH	= Biro Bantuan Konsultasi Hukum
ddd. KKN	= Kuliah Kerja Nyata
eee. PKL	= Praktik Kerja Lapangan
fff. UKM	= Unit Kegiatan Mahasiswa
ggg. Hima	= Himpunan Mahasiswa
hhh. Kopma	= Koperasi Mahasiswa
iii. IKU	= Ikatan Istri Karyawan Unpas
jjj. Kopertis	= Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
kkk. PNS/ DPK	= Pegawai Negeri Sipil / dipekerjakan
lll. NIP	= Nomer Induk Pegawai
mmm. NUP	= Nomer Urut Pegawai (bagi non-akademik)
nnn. NIY	= Nomer Induk Yayasan
ooo. DP3	= Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
ppp. BAN	= Badan Akreditasi Nasional

**Gambar 3 VISI DAN MISI UNIVERSITAS PASUNDAN BAB II PASAL 4
STATUTA TAHUN 2000 (Sumber : Biro Akademik Unpas, 2002)**

